

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Periode 2020-2023, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 ditinjau dari perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka persentase rasio sebesar 57,10% dengan persentase setiap tahunnya berada pada persentase (<75%) yang tergolong ke dalam kriteria tidak efektif karena belum adanya kewenangan pengelolaan PAD secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan lemahnya promosi destinasi unggulan.
2. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 ditinjau dari perhitungan Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan angka persentase rasio sebesar 90,85% dengan persentase setiap tahunnya berada pada persentase (90%-100%) yang tergolong ke dalam kriteria tidak efisien karena anggaran dinas didominasi oleh belanja operasional, sementara program strategis dan pengembangan fasilitas tidak mendapatkan alokasi yang memadai.
3. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 ditinjau dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja menunjukkan angka persentase rasio belanja operasional sebesar 98,24% yang lebih besar dari persentase rasio belanja modal sebesar 1,64% (jumlah belanja operasional > jumlah belanja modal) yang tergolong ke dalam kriteria tidak seimbang. Akibatnya, penguatan infrastruktur pariwisata dan budaya berjalan sangat lambat.

4. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 ditinjau dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan angka persentase rasio sebesar 42,26% dengan persentase tiap tahunnya berada pada (70%-80%) dan menurun drastis hingga -26,67% yang tergolong ke dalam kriteria tidak baik karena Hal ini disebabkan oleh *refocusing* anggaran dan tidak adanya sumber pendapatan alternatif yang stabil.
5. Analisis SWOT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun anggaran 2020-2023 menunjukkan hasil bahwa dinas memiliki kekuatan internal dalam bentuk potensi wisata unggulan, SDM berpengalaman, dan sistem keuangan digital. Kendati demikian, kelemahan internal seperti keterbatasan SDM teknis dan struktur belanja yang tidak ideal masih menjadi kendala. Peluang dari program nasional dan *branding digital* tersedia, tetapi di sisi lain, *refocusing* anggaran, ketergantungan pada APBD dan rendahnya daya saing promosi menjadi ancaman yang signifikan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi diharapkan memperkuat posisi PAD melalui pengusulan regulasi retribusi sektor budaya dan pariwisata, menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata unggulan secara profesional dan berbasis kontrak kinerja, melakukan evaluasi dan perencanaan ulang struktur belanja dinas dengan menurunkan porsi operasional dan meningkatkan alokasi untuk program pembangunan fasilitas, mengoptimalkan dokumen strategis yang dimiliki (Renstra, RIPPARDA, RPJMD) dalam menyusun program prioritas yang berorientasi pada *outcome* dan bisa dikaitkan dengan program nasional seperti “Desa Wisata” dan “Karisma Event Nusantara”, meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM teknis,

mengintegrasikan *branding* daerah dengan kampanye nasional pariwisata, seperti “Bangga Berwisata di Indonesia”, serta secara aktif membentuk kalender event wisata tahunan untuk membangun pendapatan tetap dan memperkuat citra pariwisata Provinsi Jambi.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa diharapkan untuk memperluas pendekatan metode menjadi kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (*mix-method*) agar dapat menjangkau aspek keuangan sekaligus persepsi masyarakat, pelaku industri wisata dan wisatawan, melakukan studi lebih lanjut dampak belanja pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal seperti kontribusinya terhadap UMKM, serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar destinasi, membandingkan kinerja keuangan Disbudpar Jambi dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa namun lebih berhasil dalam pengelolaan PAD sektor wisata, mengevaluasi realisasi dokumen Renstra dan RPJMD secara periodik, agar ditemukan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan sehingga dapat dilakukan koreksi tepat waktu, memasukkan indikator keberlanjutan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari evaluasi pengembangan pariwisata untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan kelestarian nilai budaya dan ekosistem lokal.